

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Good Corporate Governance

2.1.1.1 Pengertian Good Corporate Governance

Good corporate governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Menurut Cadbury of United Kingdom dalam Sukrisno Agoes (2009:101) menjelaskan bahwa :

A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut FCGI (*Forum Corporate Governance Indonesia*) Gideon (2005) yang dialihbahasakan Rahmawati (2012:169) mendefinisikan *corporate governance* adalah :

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta peran para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Sukrisno Agoes (2009:101) menyatakan bahwa :

Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) (2003) dalam Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:35) *good corporate governance* adalah:

Good Corporate Governance adalah struktur yang meliputi *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer dalam menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk mengawasi kinerja.

Menurut Tricker (2003) dalam Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:35) menyatakan bahwa :

Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi diantara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak yang terkait lainnya, akibat adanya ketidak konsistenan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul.”

Jadi menurut dari beberapa definisi diatas menunjukan bahwa *Good Corporate Governance* mencakup beberapa hak seperti perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan adil, peranan *stakeholder* dalam perusahaan, *responsibility*, *transparansi* dan *akuntabilitas*. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat

menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.

Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem yang terdiri dari (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara beberapa pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki secara secepatnya.

2.1.1.2 Asas - Asas Good Corporate Governance

Menurut Moh Wahyudin Zarkasy (2008:38) mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu :

- “1. Transparansi (*transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*responsibility*)
4. Independensi (*independency*)
5. Kesenjajaran (*fairness*)”.

Penjelasan dari masing – masing prinsip GCG yang telah dikemukakan di atas dapat diberikan sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang dapat mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak nya
- 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi
- 3) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari peranannya dalam pelaksanaan GCG
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)

- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan penundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*)
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

Pedoman pokok pelaksanaan :.

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif

5. Kesenjangan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Pedoman pokok pelaksanaan :

- 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

2.1.1.3 Pihak-Pihak yang berperan dalam menjalankan praktek Good Corporate Governance

Pemegang saham atau pemilik modal yang harus dilindungi hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut KEP-117/M-MBU/2002 adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

Yakni Dewan Pengawas yang mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan pengelolaan perusahaan yang dilakukan para pimpinan perusahaan.

b. Pimpinan Perusahaan

Yakni pejabat yang ditunjuk pemegang saham untuk mengelola perusahaan serta wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham atau pemilik modal.

c. Pimpinan Unit

Yakni pejabat yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan operasional.

d. Pejabat Struktural

Yakni pegawai yang ditunjuk Pimpinan Perusahaan untuk menjalankan fungsi didalam unitnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit.

e. Pegawai

Yakni orang yang bekerja pada Perusahaan dan menerima gaji berdasarkan hubungan kerja.

2.1.1.4 Manfaat dan Persyaratan Penerapan Good Corporate Governance

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* ini diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mas Achmad Daniri (2005:14) manfaat dan persyaratan penerapan GCG antara lain :

1. Mengurangi *agency cash*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Secara umum menurut Indra Surya (2006:68) Penerapan GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Menurut Sedarmayanti (2012:60) tujuan penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN dalam keputusan BUMN Nomor: 117/M MBU/2000 adalah :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai normal yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan Investasi nasional.
6. Mensukseskan program investasi.

2.1.1.5 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Good Corporate Governance

Menurut Mas Achmad Daniri (2005:15) mengemukakan bahwa *good corporate governance* dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *Eksternal*

Faktor *eksternal* adalah berbagi faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, antara lain :

- a. Tercapainya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supermasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dan *clen government* menuju *good corporate governance* yang sebenarnya.
- c. Tercapainya contoh pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG dimasyarakat.
- e. Adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik dimana perusahaan harus beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan pelunasan peluang kerja.

2. Faktor *Internal*

Faktor *internal* adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan prakyek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di Perusahaan

- b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*
- c. Adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*
- d. Terjadinya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
- f. Kualitas, *skill*, kredibilitas, dan integritas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi juga dalam waktu panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan.

2.1.2 Pengertian Audit

Audit merupakan bagian dari fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian terdiri dari pengawasan dan tindak lanjut. Pengawasan yang dilakukan dari dekat dan langsung pada objek yang diperiksa disebut audit.

Dalam setiap audit akan terjadi proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan sebenarnya yang melekat pada objek yang diteliti. Kriteria adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diteliti. Suatu audit akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Pengertian atau definisi Audit menurut Arens atau Loebbecke (2009:9) adalah :

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantitative information of an economic entity to determine and report on the degree of correspondence between those assertion and established criteria, auditing should be done by a competent, independent person.

Menurut Arens dan Loebbecke (1996:1) definisi Audit adalah sebagai berikut :

Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi.

Mulyadi (2002:35) menjelaskan pengertian Audit adalah :

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan (auditing) merupakan suatu proses pengumpulan dan penilaian bukti yang dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten mengenai informasi kuantitatif dari suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan pelaporan tingkat perbedaan antara informasi kuantitatif dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian auditing menurut William F. Meisser, Jr (2003:8) dalam Sukrisno Agoes (2004:5) adalah sebagai berikut :

Proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Pengertian auditing menurut The American Accounting Association's

Committee on Basic Auditing Concepts (Auditing: Theory And Practice, edisi 9, 2001:1-2) dalam Syahroza Akhmad (2003:6) adalah :

Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa auditing suatu proses yang sistematis, independen, entitas, kompeten, objektif, asersi, akumulasi.

1. sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu , mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya.
2. Independen adalah bebas, merdeka atau berdiri sendiri .
3. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi, misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Dalam pengembangan sistem, entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal seperti misalnya membedakan dokumen dengan pemrosesan pesanan.
4. Kompeten adalah ketrampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan

spesifik. Kompeten harus dibedakan dengan kompetensi, walaupun dalam pemakaian umum istilah ini digunakan dapat dipertukarkan.

5. Objektif adalah berita harus dikemukakan secara faktual, berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi, bukannya berpatokan pada orang yang memberitakannya, ataupun penonton.
6. Asersi adalah Pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit serta dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar.
7. Akumulasi adalah pengumpulan, perhimpunan, penimbunan, modal, tambahan dana secara periodik dari bunga atau dari laba neto.

2.1.2.1 Jenis Audit

Menurut Arens dan Loebeckke (2003)

Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten

Menurut Mulyadi (2002:35) Audit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria- kriteria yang telah

ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak.

2. Audit kepatuhan (compliance audit). Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu . Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai perusahaan.
3. Audit operasional (operational audit). Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.

2.1.2.2 Audit Internal

Merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah Ikatan Auditor Internal dalam Mesier (2005:514) Sukrisno Agoes (2004:98) mendefinisikan audit intern sebagai berikut :

Audit Intern adalah aktivitas independen keyakinan, objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit Intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas, manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pelaksanaan Audit Internal diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Hiro Tugiman (2006 : 53)

“Pelaksanaan pemeriksaan internal harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (follow up)”

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa audit intern mengandung aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan audit yang independen dan objektif berarti tidak terpengaruh oleh pihak dan tidak terlibat dalam pelaksanaan yang diaudit.

Amin Widjaja Tunggal (2008 : 51), mendefinisikan internal audit adalah sebagai berikut:

Internal audit adakah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit intern merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen.

Mulyadi dan Kanaka P (2005:202) mengemukakan “Audit intern merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya” Sedangkan menurut Agoes (2004 : 221) mengemukakan internal audit (pemeriksaan intern) adalah :

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Peraturan pemerintah yang dimaksudkan di sini misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Sedangkan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

2.1.2.3 Auditor

Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajarandalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. (Arens, 1995). Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi,2005:73).

Menurut Mulyadi (2007: 75) Prosedur auditor terdiri dari lima tahapan yaitu :

1. Tahapan Perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perludilakukan agar auditor mengenal benar obyek yang akan diperiksa sehinggamenghasilkan suatu program audit yang didesain sedemikian rupa agarpelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien.
2. Mengidentifikasi resiko dan kendali. Tahap ini untuk memastikan bahwa qualified resource sudah dimiliki, dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktik-praktik terbaik.
3. Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi.
4. Mendokumentasikan dan mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasi dengan audit.
5. Menyusun laporan. Hal ini mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan.

Menurut Abdul Halim (2003:7) Berdasarkan klasifikasi pelaksanaannya auditor dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain :

1. Auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan auditor pada suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa kepada klien.
2. Auditor Internal. Auditor Internal merupakan auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan, dengan tugasnya adalah membantu manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efesien dan efektif.

3. Auditor Sektor publik Auditor sektor publik merupakan auditor yang berada dalam organisasi pemerintahan.

2.1.2.4 Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Tujuan audit intern yang dikemukakan oleh Hartanto (2006:294) adalah meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada pengendalian intern di bidang akuntansi dan operasi cukup dan memenuhi syarat. Menilai disini dimaksudkan menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditentukan betul-betul ditaati, menilai apakah aktiva perusahaan aman dari kehilangan atau kerusakan dan penyelewengan, menilai kecermatan data akuntansi dan data lain dalam organisasi perusahaan, dan menilai mutu atau pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing manajemen.

Menurut Mulyadi (2007:211) fungsi audit internal tertera seperti di bawah ini:

1. Fungsi internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi dari pengendalian intern adalah menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang berfokus pada bagian uni-unit kecil didalamnya.
2. Fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Dapat diartikan bahwa fungsi audit internal meliputi kegiatan pemeriksaan segala kegiatan dan tahapannya yang tidak terbatas pada bagian keuangan saja. Tidak hanya sampai disitu, audit internal juga mencakup penyelesaian masalah jika terdapat ketidaksesuaian didalamnya, melalui rekomendasi - rekomendasi yang membangun. Ruang lingkup dari pekerjaan internal audit oleh Sistem Pengendalian Intern yang terdapat di dalam Standar Profesi Akuntan Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20) yaitu “fungsi audit intern melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. Maksud dari pengertian ini adalah pihak SPI membantu instansi dalam hal identifikasi risiko yang dimiliki instansi, kemudian memfokuskan diri pada risiko tersebut agar dapat meningkatkan pengelolaan risiko tersebut dan melakukan pengendalian internal.

Menurut Robert Tampubolon (2005 : 1) bahwa : “fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”, sedangkan tujuan pelaksanaan audit intern adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor intern akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Tujuan utama pengendalian intern menurut Hiro Tugiman (2006:44) adalah:

Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi; kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan; perlindungan terhadap harta organisasi; penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Menurut Hiro Tugiman (2006) Dalam melaksanakan kegiatan pemantauannya, Satuan Pengawas Intern akan melakukan kegiatan-kegiatan utama pemeriksaan yang terbagi dalam enam kegiatan, yaitu:

1. Compliance test, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur telah dilaksanakan, meliputi :
 - a. Ketaatan terhadap prosedur akuntansi
 - b. Ketaatan terhadap prosedur operasional
 - c. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah
2. Verification, yang menjurus pada pengukuran akurasi dan kehandalan berbagai laporan dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan tersebut yang akan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
3. Protection of assets, Pemeriksa intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva perusahaan.
4. Appraisal of control, Pemeriksaan intern merupakan bagian dari struktur pengendalian intern yang bersifat mengukur, menilai, dan mengembangkan struktur pengendalian intern yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan.

5. Appraising performance, Suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu area operasional tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus.
6. Recommending operating improvements, Merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap area-area dimana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan pula rekomendasi-rekomendasi sebelumnya.

The Institute of Intern Auditors (IIA) (1995:39-59) dalam Wijaya Amin (2008:54) mengemukakan pelaksanaan audit intern, sebagai berikut “Performance of audit work should include: Planning the audit, Examining and evaluation information, Communicating result, Following up.” Pengertian empat langkah kerja pelaksanaan audit intern diatas menurut Hiro Tugiman (2006:53-78) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan harus didokumentasikan dan mencakup
 - a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan,
 - b. Mendapatkan informasi mengenai aktivasi yang diperiksa,
 - c. Menentukan sumber – sumber yang penting dalam melaksanakan audit,
 - d. Mengkomunikasikan dengan pihak – pihak tertentu,
 - e. Melakukan survey langsung,
 - f. Menulis program audit,
 - g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil audit dikomunikasikan,
 - h. Mendapatkan persetujuan dan perencanaan pekerjaan audit.
2. Proses
 - a. Seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan dan ruang lingkup dikumpulkan,
 - b. Prosedur audit termasuk teknik pengujian dan sample harus dipilih,

- c. Proses pengumpulan analisis dan interpretasi serta dokumentasi harus diawasi untuk memelihara objektivitas.
- 3. Audit intern harus melaporkan hasil audit
 - a. Laporan ditulis setelah pekerjaan audit selesai,
 - b. Audit intern harus mendiskusikan kesimpulan – kesimpulan dan rekomendasi rekomendasi dengan pihak manajemen,
 - c. Laporan harus objektif dan jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu,
 - d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan keberhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi,
 - e. Laporan menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil pemeriksaan.
- 4. Pemeriksa intern harus melakukan tindak lanjut untuk memastikan tindakan yang pantas dilakukan.

Peran Audit Internal. Menurut PP nomor 23 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 angka 3, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam profesi audit internal tentunya memiliki standar profesi yang akan meningkatkan kinerja para auditor.

Standar tersebut terdiri dari standar atribut, standar kerja dan standar implelementasi. Fokus pada standar kinerja, standar ini dibagi menjadi tujuh elemen, yaitu pengelolaan fungsi audit internal, lingkup penugasan, perencanaan

penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut, dan resolusi penerimaan resiko oleh manajemen.

2.1.2.5 Aktivitas Pelaksanaan Audit Internal

Menurut William F Messier et.al (2005:515) pelaksanaan audit internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu Jasa Assurance dan Jasa Konsultasi.

Jasa Assurance melibatkan penilaian objektif auditor internal atas bukti-bukti untuk memberikan pendapat independen/ kesimpulan mengenai suatu proses, sistem atau subjek masalah lain, jasa Konsultasi berbentuk pemberian saran dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien.

Menurut Dadang Suwanda (2013:114) dalam penjaminan kualitas

(assurance) penyelenggaraan pemerintah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

(APIP) dapat melakukan kegiatan pengawasan intern melalui :

1. “Audit (pemeriksaan), adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar hasil pemeriksaan.
2. *Review* , adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah

ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan pengawasan lainnya, berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan”.

Dalam Jasa Konsultasi, auditor internal dapat memberikan nilai tambah dalam penugasannya dengan cara memberikan metode-metode, pengetahuan, serta praktik terbaiknya dalam membantu manajemen memecahkan masalah (Hery,2010:66).

2.1.2.6 Indikator Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:53), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

1. “Tahap perencanaan audit
2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi
3. Tahap penyampaian hasil audit
4. Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan”.

Menurut Hiro Tugiman (2006:53), penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

1. “Tahap Perencanaan Audit

Audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:

- a. Peroleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa.
- b. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.

2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:

- a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
- b. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.

3. Tahap Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:

- a. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
- b. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.

4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, atautkah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan”.

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan ringkasan dari peristiwa-peristiwa dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk atau dinyatakan dalam uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari kejadian tersebut. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa, laporan akhirpun disajikan dalam nilai uang.

Menurut Kusrini dalam bukunya “Akuntansi keuangan *Intermediate*” mendefinisikan laporan keuangan :

Suatu daftar keuangan yang dibuat pada akhir periode yang berasal dari catatan aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. (2002;2)

Sedangkan menurut Munawir dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” mendefinisikan laporan keuangan :

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan modal dimana neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber-sumber penggunaan dana atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan modal. (2002;5)

Dengan melihat beberapa pengertian laporan keuangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan tentang posisi keuangan, tentang hasil operasi perusahaan, dan tentang perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan perusahaan dimana nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai.

Para pemilik perusahaan sangat berkepentingan atas laporan keuangan perusahaannya terutama untuk perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain seperti perseroan, karena dalam laporan tersebut pemilik akan dapat menilai sukses tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

2.1.3.2 Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun perusahaan memiliki kemampuan *liquiditas*, sehingga dapat digunakan pemakai informasi *intern* (pihak dalam) maupun *ekstern* (pihak luar) perusahaan.

Menurut Susan Irawati dalam bukunya “Akuntansi Dasar 1 & 2”, Fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi *financial* sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan”.

(2008;145)

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Dalam UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) jelas bahwa laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggung-jawaban pengelolaan perusahaan oleh pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris). Sebagai alat pertanggung-jawaban, laporan keuangan wajib disampaikan kepada para pemilik. Namun dengan semakin besar keterlibatan pihak lain, maka laporan keuangan menjadi bagian penting kepada pihak lain.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan.
2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.
3. Merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen.

(2007;3)

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim, sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan perusahaan.

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan

Menurut S. Munawir (2004:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal. Dimana neraca menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.

Menurut Hadri Mulya (2010:15) Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Kondisi keuangan yang digambarkan terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Istilah saat tertentu ditunjukkan pada kata-kata “Per 31 Desember” yang berarti kondisi keuangan pada satu hari yaitu tanggal 31 Desember.
2. Laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu. Periode yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan umumnya 1 tahun, baik

menggunakan tahun takwin maupun tahun buku. Periode tertentu biasanya dinyatakan dengan “periode 1/1 – 31/12 20XX”. Dengan demikian jelas menunjukkan kapan awalnya dan kapan akhirnya.

3. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas sebuah perusahaan pada saat tertentu. Laporan perubahan ekuitas disajikan setelah diketahui kondisi laba atau rugi perusahaan. saat tertentu dinyatakan sama dengan neraca di atas.
4. Laporan arus kas, yaitu laporan keuangan menggambarkan lalu lintas keuangan baik dari sisi kas masuk maupun dari sisi kas keluar. Laporan keuangan kas ini akan memberikan gambaran kepada pemakai kapan saatnya kondisi kas surplus dan kapan saatnya defisit. Begitu juga informasi tentang dari mana saja sumber penerimaan dan pengeluaran kas.
5. Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian dari laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan semua perkiraan yang ada dalam neraca, laba rugi, dan laporan perusabahan ekuitas. Penjelasan perkiraan perkiraan seperti daftar pelanggan yang berutang ke perusahaan, jenis-jenis persediaan dan daftar aktiva tetap serta rincian perkiran lainnya disajiakn pada catatan atas laporan keuangan ini

2.1.3.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). PABU adalah suatu kebiasaan atau aturan yang baik untuk melaporkan laporan keuangan. PABU berfungsi juga sebagai aturan minimum yang harus dipatuhi ketika membuat laporan keuangan.

Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya “*Intermedite Accounting*”

susunan laporan Keuangan terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Modal

(2004;19)

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu, keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva. Dalam neraca terdapat aktiva, utang, dan modal.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laba rugi juga sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih atau laba yang didapat dalam periode tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari Kas dari atau untuk kegiatan operasional, kas dari atau untuk kegiatan investasi, kas dari atau kegiatan pendanaan.

4. Laporan Perubahan Modal

Disamping penyusunan neraca dan rugi laba, pada akhir periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan. Perusahaan dengan bentuk perseroan, perubahan modalnya ditujukan di dalam laporan tidak dibagi (*retained earning*).

2.1.3.6 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi.

Baik buruknya kualitas perusahaan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan.

Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan finansial dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu. Maka dari itu, untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas baik perusahaan diharuskan menerapkan good corporate governance dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

2.1.3.7 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan secara gamblang kesehatan keuangan suatu perusahaan guna memberikan kepatuhan bisnis yang informatif. Laporan keuangan sangat penting bagi manajemen perusahaan pada khususnya untuk pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang diperoleh harus

memenuhi kriteria tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh FASB dalam Zaki Baridwan (2010:4) adalah sebagai berikut :

“Kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (*reliability*). Agar informasi itu relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (*feedback value*), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.”

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas atau tidak tergantung dari bagaimana cara pandang, karena kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dari kinerja maupun keakuratan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.

Menurut Lyn M. Fraser dan Alieen Ormiston yang dialihbahasakan oleh Sam Setyautama (2004:27), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. informasi harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data financial, dan semakin mendekati kebenaran.”

Laporan keuangan perusahaan akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Apabila laporan keuangan perusahaan berkualitas baik maka dapat dikatakan para pelaku usaha berhasil dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mampu meminimalkan resiko penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

2.1.3.8 Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan

Menurut Indra Bastian (2006:97) mengemukakan,

“Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2012:5) Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu :

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Penjelasan dari masing-masing karakteristik kualitatif laporan keuangan yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan magsud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

b. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk ini, pengguna disesuaikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud”.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di antaranya dikutip dari beberapa sumber. Penelitian yang relevansi dengan kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Jama'an (2008)	Pengaruh independensi, mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit terhadap integritas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh independensi, mekanisme <i>corporate governance</i> , kualitas audit berhasil diterima dan signifikan,	Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan tidak menggunakan variabel independensi dan Audit Internal dan menambahkan

		terhadap integritas laporan Keuangan	variabel independen yakni Good Corporate Governance
Yesi Denti Utami (2009)	Pengaruh penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Penulis menambahkan variabel sistem audit internal sebagai variabel kajian lainnya
Hayyuning Tyas Rosdiani (2011)	Pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan.	Pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 87,3%.	Penulis tidak menggunakan variabel audit laporan keuangan, Penulis menyajikan hasil dengan menggambarkan secara lebih deskriptif dan mendalam dan tempat penelitian yang berbeda.
Ambrose Kiptoo Chelimo & Bilhah Muthoni Kariuki, 2013. <i>Journal of Emerging Trends in Economic s and Managem ent Sciences.</i> ISSN: 2141- 7024	<i>An Evaluation of Internal Audit Function in Financial Reporting in Local Authorities in Kenya: A Case of Municipal Council of Eldoret</i> The	<i>The conclusion of the study is the internal audit functions have an effect on financial reporting.</i>	Tempat dan waktu penelitian & menggunakan variabel Kompetensi auditor sebagai variabel independen

Safrida Yuliani,N adirsyah & Usman Bakar, 2010. Jurnal telaah & Riset Akuntansi Vol 3 No 2 hlm 206- 220.ISSN 1693- 3397	Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)	Peran Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan Variabel Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan sebagai variabel Independen
---	--	---	--

Sumber: Hasil Pengolahan (2015)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kepercayaan public terhadap pemerintahan dalam praktik bisnis, semua perusahaan ingin selalu menjadi perusahaan yang diandalkan, terutama oleh klien dan konsumen, karena itu sangat identik dengan penjualan atau laba. Keinginn tadi dapat diwujudkan dalam bentuk kecanggihan terhadap pelayanan kepada konsumen termasuk dalam informasi laporan keuangan perusahaan untuk pengambilan keputusan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan pesatnya aktivitsa yang dilakukan serta tuntutan atas efektivitas aktivitas usaha mendorong manajemen

untuk mendelegasikan wewenangnya mengingat luas dan rumitnya aktivitas yang berjalan. Dengan perkembangan kompleksitas perusahaan memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas. Berbagai skandal yang melibatkan perusahaan menguatkan pentingnya *Corporate Governance* agar perusahaan dapat memerankan diri tidak semata sebagai identitas yang bertujuan meraih kesejahteraan ekonomi tetapi juga sebagai entitas yang bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Termasuk lingkungan alam. Untuk menangani aktivitas yang kompleks, manajemen dengan keterbatasannya membutuhkan suatu alat yang mengatur hubungan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan selanjutnya, pihak-pihak yang menjalankan fungsi masing-masing berlandas prinsip-prinsip dasar *Corporate Governance* yang berterima umum.

Good Corporate Governance mempunyai peran yang sangat penting sebagai system yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan pencitraan nilai perusahaan.

Pelaksanaan *Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akhirnya dapat meningkatkan daya informasi akuntansi. Rahmawati (2012:172)

Audit Internal adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di

tetapkan, serta penyampaian hasil hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Mulyadi (2007:35)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan (*auditing*) merupakan suatu proses pengumpulan dan penilaian bukti yang dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten mengenai informasi kuantitatif dari suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan pelaporan tingkat perbedaan antara informasi kuantitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.3.1 Hubungan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa. Penerapan GCG dapat diterapkan dalam perusahaan yaitu dengan kebijakan *Corporate Governance*, Praktik-praktik *Corporate Governance*, Pengungkapan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan audit yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan dan tepat waktu. independensi serta kesetaraan dan kewajiban. Penerapan GCG mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut **YPPMI & SC** yang dikutip oleh **Akadun** dalam bukunya yang berjudul “**Administrasi Perusahaan Negara**” menyatakan bahwa :

“Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, transparency, accountability dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan GCG secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan”.

(2007;146)

Dengan adanya kebijakan, praktik-praktik *Corporate Governance*, pengungkapan yang mengedepankan prinsip GCG dan audit dapat meningkatkan Kualitas Laporan keuangan.

Menurut hasil penelitian Yesi Denti (2009) menyatakan

“*Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang salah satunya adalah dapat meningkatkan kualitas laba yang diperoleh.”

Menurut jama,an (2008) pengaruh good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan adalah :

pengaruh kualitas laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pengelola sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan tidak terlepas dari proses penyusunan. Proses penyusunan laporan keuangan ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan diantaranya adalah pihak manajemen. Untuk menilai integritas informasi laporan keuangan yang disajikan peranan dewan komisaris dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan dan menjamin tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) guna menghasilkan integritas laporan keuangan yang bermutu.

2.3.2 Hubungan Pelaksanaan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berikut merupakan beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai keterkaitan Pelaksanaan Audit Internal terhadap kualitas laporan keuangan:

Menurut Dadang Suwanda (2013:190) dalam bukunya strategi mendapatkan opini WDP laporan keuangan pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah.

Aktivitas audit internal berupa penjaminan kualitas (quality assurance) adalah review laporan keuangan, review dilakukan berupa pengujian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberikan asersi/pendapat oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 Ayat 3,

Fungsi pemeriksaan intern/Pelaksanaan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja Pemda dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK.

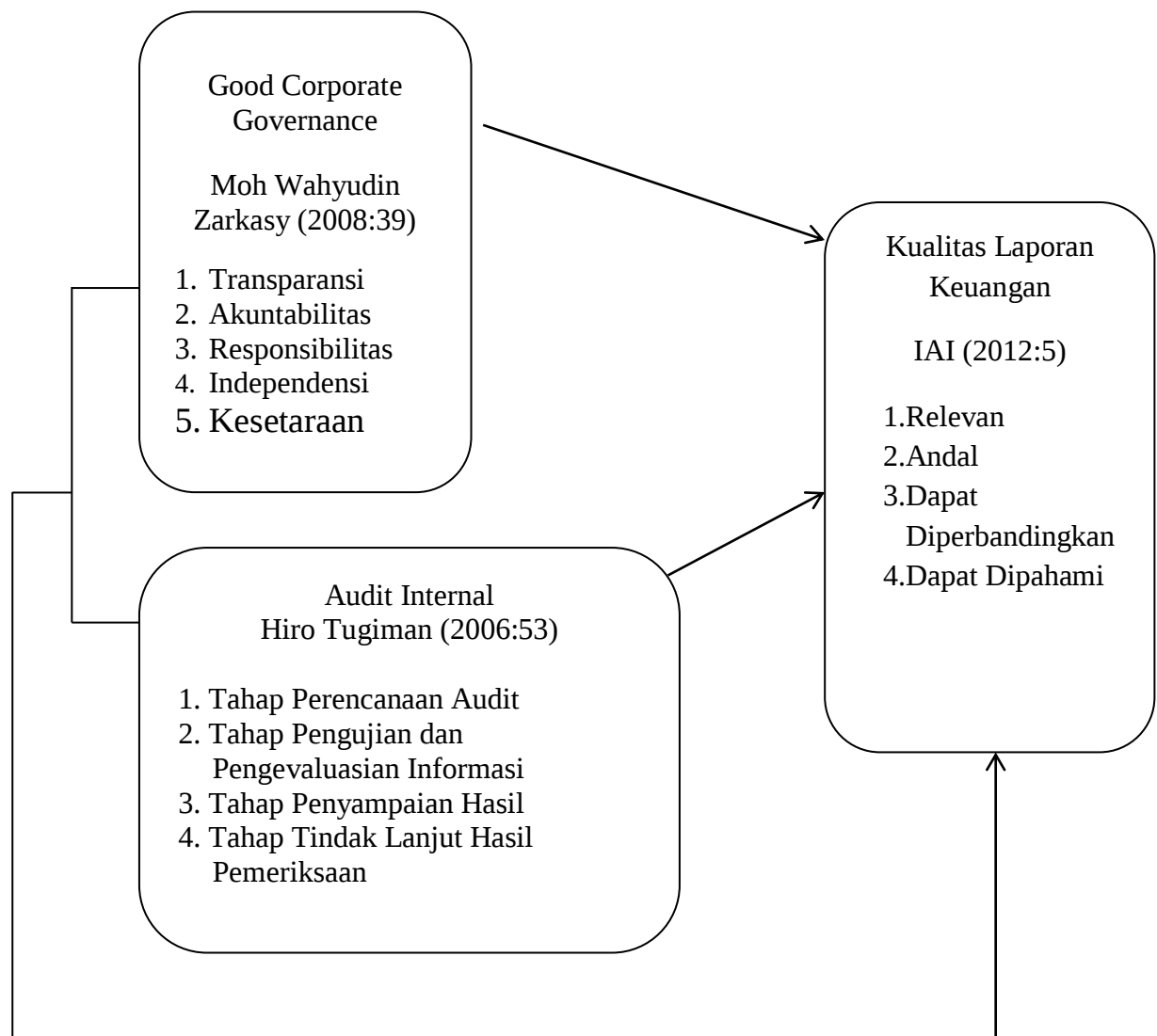
Safrida, Nadirsyah & Usman Bakar (2010) berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan Pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan yaitu:

“Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan”.

Ambrose Kiptoo Chelimo & Bilhah Muthoni Kariuki (2013) berdasarkan hasil penelitiannya menjelaskan Pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu:

“The conclusion of the study is the internal audit functions have an effect on financial reporting.”

Dari kerangka pemikiran di atas maka dapat digambarkan alur hubungan antara Good Corporate Governance dan Audit Internal terhadap Kualitas Laporan keuangan dalam paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Maka berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan .
2. Pelaksanaan Audit Interna berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pelaksanaan Audit Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.